

Dampak Keberadaan PT.Freeport Indonesia Terhadap Tingkat Sosial Ekonomi Masyarakat Suku Amungme Dan Suku Kamoro di Kabupaten Mimika

**PAULUS R.T.PARAMMA
ALPIUS DOO**

ABSTRACT

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana keterlibatan PT Freeport dalam mengisi peningkatan pembangunan sumber daya pendidikan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat asli suku Amungme dan Kamoro Kabupaten Mimika di pedalaman Papua sebagai hak pemilik ulayat daerah penambangan ketika eksplorasi sampai pada eksploitasi pertambangan dimulai. Ketika PT Freeport telah berada di wilayah Kabupaten Mimika telah terjadi peningkatan bidang ekonomi dan pendidikan pada masyarakat dua Suku Amungme dan suku Kamoro, tetapi juga terjadi mengalami permasalahan atas kehadirannya. Sehubungan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif dimana akan menggambarkan tentang permasalahan yang ada secara kualitatif. Penulis menjelaskan fakta yang ada dari berbagai sumber buku dan majalah surat kabar atau internet ataupun literatur-literatur. Semua data ini pengumpulannya melalui penelitian Pustaka atau telah pustaka Library research, terhadap permasalahan yang di batasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan PT Freeport – Amerika Serikat secara pandangan positif telah dan akan terjadi perubahan daerah dari terisolir karena atas nama pembangunan daerah. Tetapi dalam kaitannya dengan perubahan wilayah daerah masyarakat adat segi negatifnya adalah akan menimbulkan konflik antara marga, etnis atau suku baik vertikal maupun horizontal pihak perusahaan atau pemerintah karena proses pelaksanaan pembangunannya tidak melibatkan masyarakat dalam peningkatan ekonomi dan pendidikan secara penuh. Walaupun dalam berbagai media telah dituliskan bahwa Community Development telah memfokuskan program bemitra masyarakat dua suku melalui lembaga pemberdayaan masyarakat Amungme dan Kamoro. Akibatnya adalah terjadi konflik karena rasa ketidakadilan atas ekonomi dan pendidikan sense of injustice educations and economic pada masyarakat dua suku pedalaman Papua yang berada pada wilayah kekuasaan penambangan PT Freeport Amerika Serikat.

Kata Kunci: *PT.Freeport, Dampak, Amungme Kamoro*

PENDAHULUAN

Perubahan dunia secara global adalah sebuah proses pembangunan multidimensi yang mengantar pada tatanan dunia tanpa membedakan suku atau bangsa pada sebuah negara. Perubahan sistem sosial secara global yang akan banyak memberikan dampak, baik negatif maupun positif pada seluruh tatanan kehidupan masyarakat di bumi. Sebuah pandangan yang lebih subyektif beranggapan bahwa globalisasi adalah situasi yang sengaja diciptakan untuk mengkapitalismekan dunia. Ketika dikendalikan oleh berbagai organisasi internasional terutama perusahaan multinasional untuk kepentingan ekonomi politik internasional (Rudy, 2003).

Kepentingan ekonomi politik dengan tujuannya penanaman investasi asing pada suatu negara tanpa adanya perbandingan pada unsur-unsur yang merugikan dan menguntungkan bagi masyarakat. Proses perubahan dunia ini, kembali melihat pada proses perubahan negara Indonesia umumnya dan daerah Papua khususnya yang sangat sedang dan akan kita merasakan. Efek yang menjadi persoalan adalah masyarakat Indonesia secara khusus Papua mengantar pada posisi yang mempertanyakan kebijakan-kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan secara global yang membawa perubahan daerah secara signifikan, tetapi juga menjadikan permasalahan kalangan pemangku kepentingan (*stake holder*) pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya karena kompleksitas permasalahan yang tidak sederhana. Permasalahan yang terjadi adalah melahirkan konflik antara marga, etnis atau suku bangsa secara multinasional.

Ketika PT Freeport McMoran, perusahaan multinasional Amerika Serikat bekerja sama dalam bidang pertambangan negara Indonesia, mengontrak kerja untuk menambang hasil-hasil kekayaannya di daerah Papua Timika wilayah pegunungan tengah, memunculkan berbagai fenomena yang menjadi pokok pembahasan terutama kepada kedua suku Amungme dan Kamoro. Menurut pandangan masyarakat suku Amungme dan Kamoro, hasil penambangan kekayaan dari PT Freeport McMoran Amerika di Tembagapura telah banyak memberikan manfaat bagi seluruh negara

namun belum memberikan manfaat bagi masyarakat dua Suku Amungme dan Kamoro. Jika melihat dari perbandingan dalam rangka pembangunan daerah dengan pembukaan wilayah tanah dari keterisolasi, telah masuk pada wilayah daerah tanah milik masyarakat adat yang dahulunya tanah keramat, tanah leluhur moyang.

Data yang diperoleh, dalam catatan sejarah pembangunan PT Freeport, melalui berbagai media terutama media elektronik menjelaskan bahwa pada awal masuknya sampai tahun 2006 ada sejumlah negara sekitar 14 negara telah bekerja sama dengan PT Freeport dalam pembagian hasilnya. Perkembangan selanjutnya bertambah banyak sejumlah negara untuk kepentingan ekonomi kapitalis. Kepentingan ekonomi kapitalis yang memiliki fungsi ekonomi yang berbasis kepada perusahaan asing negara. Berbasis kepentingan yang akan membuka wilayah karena atas nama pembangunan atau penambahan PAD (pendapatan asli daerah). Konsep ini dalam kerangka pembangunannya memang harus kita mendukung, namun proses pelaksanaannya yang akan melahirkan beragam persoalan apabila tidak ada upaya yang maksimal dan manusiawi dalam mengalifungsikan tanah adat tersebut.

Rasa ketidakadilan (*Sense of Injustice*) yang menjadi latar beralihnya fungsi sosial tanah adat ke fungsi ekonomi kapitalis, memunculkan rasa ketidakpuasan dimasyarakat. Terjadi karena pengelolaan hak pemilik tanah dan sumber daya alam umumnya setelah masuknya PT Freeport, tidak melibatkan masyarakat secara maksimal (bandingkan Stefanus, 2007). Dari perspektif sejarah budayanya bahwa tanah perusahaan Freeport sekarang tersebut, berawal ketika pembentukan lempengan tanahnya dimulai dari adanya mitos seorang ibu yang kemudian wafat dan berubah menjadi tanah disepanjang daerah Amungsal (Tanah Amungme). Daerah ini dianggap keramat oleh masyarakat setempat, sehingga secara adat tidak diijinkan untuk dimasuki. Namun sejak tahun 1971, PT Freeport Amerika Serikat masuk ke daerah keramat ini, dan membuka tambang Erstberg. Sejak tahun 1971 warga suku Amugme dipindahkan ke luar dari wilayah mereka ke wilayah kaki gunung Amungsal. Beberapa latar masalah pembangunan penambangan sampai pada pemanfaatannya di atas ini, dinilai dari dua versi negatif dan positif oleh masyarakat Suku Amungme dan Kamoro. Dengan alasan demikian menimbulkan pertanyaan juga antara masyarakat luas atas pembangunan itu sendiri. Akibatnya adalah pada tahun 2006 sejumlah masyarakat Papua melakukan demonstrasi di kantor PT Freeport Jakarta dan Timika. Menuntut supaya PT Freeport segera meningkatkan pembagian hasil dari perusahaan 1% sebelumnya menjadi 7% karena menurut masyarakat belum diperhatikan secara baik dalam berbagai bidang terutama kesejahteraan ekonomi sosial ([www/http.Google.co.id](http://www.google.co.id), 2006).

Hal ini menjadikan fokus perhatian penulis, sehingga dalam bab-bab selanjutnya akan kami menuliskan hasil telah pustaka berbagai fakta pembangunan, baik fakta positif maupun negatif yang mempengaruhi kapasitas kehidupan masyarakat dua suku Amungme dan Suku Kamoro di kabupaten Mimika adalah sebagai milik wilayah pengambilan bahan galian alam. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan awal penulisan, penulis merumuskan hal yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penulisan yaitu: "Bagaimana keterlibatan PT. Freeport Indonesia dalam mengisi peningkatan pembangunan sumber daya kualitas dan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada dua suku Amungme dan Kamoro di Kabupaten Mimika sebagai hak pemilik ulayat wilayah penambangan."

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menjelaskan permasalahan dalam tulisan ini, maka penulis akan menggunakan teori dan konsep antara lain:

1. Teori Kepentingan

Studi Hubungan Internasional pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi antara Negara maupun non-negara dalam sistem internasional. Aktor-aktor dalam interaksi ini terutama interaksi antara Negara didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing, untuk memperjuangkan tujuan dan kepentingan nasionalnya. Negara tidak dapat melepaskan diri dari kebijakan baik yang ditujukan ke luar Negara tersebut (politik luar negeri) maupun ke dalam negeri (domestik).

Kepentingan Nasional merupakan tujuan utama dari semula dasar sampai tingkat akhir perjuangan suatu Negara (L Spigel, 1995). Kepentingan nasional dasar di bagi menjadi empat menurut Holsti yaitu:

- a. Ideologi
- b. Ekonomi
- c. Keamanan
- d. Prestise / pengaruh

Amerika Serikat mendukung dalam pengembangan ekonomi politik internasional bidang perusahaan multi nasional (penanaman modal negara lain) merupakan kebijakan dan kepentingan

Amerika Serikat. Oleh Holsti merumuskan pengertian kepentingan Nasional sebagai berikut: "Istilah kepentingan nasional berkaitan dengan beberapa kumpulan cita-cita tujuan suatu bangsa yang berusaha di ciptakan melalui hubungan dengan Negara-Negara lain.

Untuk mencapai tujuan nasionalnya AS mendukung program pengembangan penambangan ekonomi politik internasional melalui perusahaan multinasional PT Freeport Indonesia. Keputusan Amerika Serikat yang langsung mengambil kebijakan boleh dikembangkan guna meningkatkan kepentingan Amerika Serikat, ini telah menimbulkan permasalahan di bidang ekonomi politik internasional. Pengertian politik internasional menurut Kosumthamidjodjo adalah sebuah politik internasional yang mencakup kepentingan (*interest*) dan tindakan (*actions*), dimana proses interaksi antara Negara maupun tingkat Negara dengan organisasi internasional merangkum elemen-elemen sistem Internasional. Kepentingan-kepentingan nasional Amerika Serikat tersebut nantinya dituangkan ke dalam kebijakan-kebijakan luar negeri sebagai salah satu instrumen dari politik internasional.

Sedangkan arti politik luar negeri di rumuskan Teuku May Rudy sebagai berikut: "Politik luar negeri merupakan sekumpulan kebijakan yang berperan dan berpengaruh, dalam suatu Negara (pemerintah) dengan Negara (pemerintah lainnya), dengan pertimbangan dan juga tanggapan (respon) terhadap kejadian dan masalah di lingkungan dunia Internasional". Politik luar negeri mempelajari tindakan-tindakan suatu Negara terhadap lingkungan eksternalnya dan beserta berbagai kondisi yang melingkupi tindakan tersebut.

Holsti mengkatégorikan politik luar negeri ini menjadi tiga yaitu:

1. Pengaruh (aspek power) yang pada dasarnya merupakan perangkat untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pengaruh lebih dari sekedar kemampuan-kemampuan aktor A untuk mengubah kemampuan Aktor B pengaruh juga dapat dilihat sebagai satu usaha yang di jalankan oleh aktor A agar aktor B melanjutkan tindakan atau kebijakan yang bermanfaat atau searah dengan aktor A* (Holsty, 1987).

2. Kapabilitas yaitu kekuatan mental atau fisik atau kualitas yang di miliki dan bisa digunakan sebagai perangkat pendesak untuk membujuk pemberi imbalan, mengancam dan memberikan saksi.

3. Respon terhadap Negara lain Menurut kamus Marrian Wabster Collegiate Dictionary Edisi reaksi di terjemahkan sebagai sebuah hal yang menantang kita terhadap: a. Tantangan atau perlawanan suatu kekuatan, pengaruh, Gerakan

- b. Respon terhadap situasi dan stimulasi

- c. Tindakan akan proses bertindak dalam memberikan respon.

Penulis cenderung menggunakan definisi kedua yaitu reaksi merupakan respon terhadap situasi dan stimulus di kenakan menurut penulis definisi ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

Amerika Serikat (AS) sebagai aktor dalam sistem Internasional di belahan dunia ini, dapat dilihat melalui kekuasaan (*power*) yang dimilikinya untuk itu diperlukan pemahaman mengenai konsep power seperti yang dikemukakan oleh Holsti sebagai berikut: Kekuasaan (*power*) didefinisikan sebagai kemampuan umum suatu Negara untuk menguasai atau mengawasi perilaku Negara lain yang bisa dipandang dari berbagai aspek sebagai peringkat dasar kemampuan (Holsty, 1987). Suatu hubungan dan proses serta bisa diukur dengan pikiran. Sehingga berdasarkan konsep *power* kondisi Negara-Negara sebagai aktor dalam sistem internasional dapat dilihat dengan jelas.

2. Teori Community Development

Community Development adalah dua pengertian yang saling bertalian antara satu dengan yang lainnya. Dimana *Community* dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia adalah "masyarakat", dan dalam bahasa Indonesia adalah "komunitas" sementara kata *Development* adalah "perkembangan terakhir". Jadi, *Community Development* adalah perkembangan terakhir dari pada kelompok atau komunitas organisme masyarakat yang hidup dan saling berinteraksi di suatu daerah tertentu (Gunawan, 2003).

Community dalam arti komunitas bermakna sebagai:

1. Kelompok sosial yang bertempat tinggal di lokasi tertentu, memiliki kebudayaan dan sejarah yang sama.

2. Kesatuan pemukiman yang di atasnya terdapat kota kecil/*town*, atau kota besar/*city*.

Community Development pada garis besarnya dapat ditinjau dalam dua pengertian yaitu sebagai berikut:

1. Dalam arti luas bermakna sebagai perubahan sosial berencana dengan sasaran perbaikan dan peningkatan bidang ekonomi dan sosial.

2. Dalam arti sempit adalah perubahan social berencana di lokasi tertentu : Dusun, kampung, desa, kota kecil dan kota besar, dikaitkan dengan proyek yang berhubungan dengan upaya

pemenuhan dari kebutuhan lokal, sepanjang mampu di kelola sendiri dan dengan bantuan sementara dari pihak luar.

Jadi esensi *Community Development* yang kemudian mengilhami model pembangunan yang berpusat pada rakyat, adalah upaya pemberdayaan (*empowerment*) terhadap rakyat berdasarkan integrasi ide-ide kemandirian. Menurut Arthur Dunheim *Community Development* berarti usaha terorganisir untuk memperbaiki kondisi kehidupan komunitas dan peningkatan kemampuan berintegrasi dan berkembang secara mandiri, dengan unsurnya: program berencana, pembangkitan tekad, tidak tergantung pada bantuan pihak luar.

Menurut L.Nelson dan C.Ramsay berpendapat bahwa *community* adalah proses pendidikan untuk bertindak, masyarakat disiapkan untuk mewujudkan tujuan komunitas secara adil dan sejahtera. Pemimpin berperan sebagai agen untuk membentuk pengalaman belajar bagi komunitas dari pada sebagai penggerak tercapainya sasaran program. Menurut Sumitro Maskun: *Community Development* adalah program yang berusaha menjangkau masyarakat yang kondisi sosial ekonominya masih dalam keadaan relatif rendah dan sulit untuk berkehidupan memenuhi syarat kelayakan dalam kehidupan kesejahteraan masyarakat.

Dalam *knowledge based economy*, pengertian yang diambil adalah sebagai proses perekonomian dari suatu komunitas masyarakat berdasarkan prakarsa sendiri dengan dorongan bantuan pihak luar dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi sosial-budaya komunitas masyarakat serta meningkatkan kemampuan mereka untuk peningkatan taraf hidupnya, meliputi:

1. Partisipasi masyarakat dalam upaya memperbaiki taraf hidupnya atas dasar kekuatan/prakarsa sendiri.

2. Bantuan dan pelayanan teknis, bersifat tidak permanen, untuk membangkitkan tekad menolong diri sendiri melalui program terencana dengan sasaran kepentingan komunitas lokal (Mahler dan Sabirin, 2008)

Oleh karena itu, proses pemberdayaan masyarakat penting untuk dilaksanakan agar :

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang, bertitik tolak pada pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya membangun potensi itu dengan mendorong dan membangkitkan potensi yang dimiliki;

2. Memperkuat potensi Masyarakat (*empowering*), meliputi langkah nyata menyangkut penyediaan masukan serta pembukaan akses kepada peluang yang akan menjadikan masyarakat semakin berdaya. Upaya pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses kepada sumber kemajuan ekonomi seperti: modal, teknologi informasi, lapangan kerja dan pasar difokuskan menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar baik fisik, ketersediaan lembaga pendanaan serta pelatihan dan pemasaran.

3. Melindungi dan mencegah kelompok yang lemah menjadi bertambah lemah karena kekurangan-pemberdayaan menghadapi kelompok yang kuat. Perlindungan dan pemihakan yang lemah, amat mendasar sifatnya. Melindungi tidak berarti mengisolasi, karena mengkerdikan yang kecil dan lemah, tetapi harus di lihat sebagai upaya mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi kelompok yang kuat atas kelompok yang lemah.

Model perubahan yang meletakkan rakyat sebagai subyek bisa menjadi alternatif, karena menjamin terciptanya hubungan struktur ekonomi, politik, pendidikan dan budaya yang lebih baik, dimungkinkan tetap memiliki pluralisme budaya dan ruang dimasyarakat berfungsi sebagai pelaku utama ekonomi mereka sendiri agar perspektif kerakyatan memberi harapan demokratisasi, relasi politik ekonomi di kalangan rakyat.

Menurut Agust Kafi berpendapat juga bahwa perspektif kerakyatan dalam *community* yang memfokuskan pada pengembangan sosial ekonomi lokal dalam komunitas. Pengembangan ekonomi lokal yang meliputi sektor pertanian perikanan, kehutanan, usaha kecil dan menengah (UKM), perindustrian maupun jasa-jasa dan juga suatu kemitraan, terutama untuk pembangunan infrastruktur (PTFI, 2006).

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mendeteksi problem dan mencari jawaban. Dengan kata lain, metode penelitian adalah teknik-teknik spesifik dalam penulisan yang terarah dan sistematis. Adapun metode dan teknik spesifik yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. **Metode Deskriptif**

Metode deskriptif yaitu menggambarkan tentang permasalahan yang ada secara kualitatif.

2. **Teknik Pengumpulan Data**

Cara mengumpulkan data oleh peneliti adalah melalui penelitian kepustakaan yaitu menelusuri literatur-literatur dan sarana bacaan yang berkaitannya dengan permasalahan yang ada.

Dimana peneliti akan mengkaji berdasarkan kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang terakreditasi (diakui kepakarannya) setelah hasil penelitiannya dipublikasikan melalui jurnal/seminar dan bentuk cetakan buku yang representatif.

PEMBAHASAN

KONDISI EKONOMI DAN PENDIDIKAN

Secara umum kondisi perekonomian suku Amungme dan Kamoro masih jauh tertinggal dibanding dengan daerah lainnya di Indonesia. Tingkat kemiskinan masyarakat Amungme dan Komoro tergolong sangat tinggi dan berada di deretan paling bawah diantara daerah kemiskinan di daerah Indonesia. Oleh dosen Fakultas Ekonomi Uncen Demianus Antoh dalam bukunya menuliskan kondisi secara umum ini sangat ironis dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, tanahnya luas namun sedikit penduduknya. Kekayaan alamnya yang melimpah ini, pemanfaatannya masih menjadi pertanyaan ketika dikapitalkan sumber daya alamnya. Misalkan saja, hasil sumber daya alamnya diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan pusat melalui perusahaan multinasional PT Freeport demi penghasilan pendapatan asli daerah (PAD) (Antoh, 2008).

Dalam tulisan lain, menuliskan pandangan positifnya tentang keberadaan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang bergerak di bidang pertambangan. Keberadaannya memberikan manfaat ekonomi langsung dan tidak langsung yang cukup besar bagi pemerintah di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten, dan bagi perekonomian masyarakat Papua dan Indonesia secara keseluruhan dan khususnya pada masyarakat Suku Amungme dan Kamoro. Manfaat langsung termasuk kontribusi lazimnya suatu perusahaan kepada negara. Ada beberapa manfaat langsung seperti pajak, royalti, dividen, iuran dan dukungan langsung lainnya merupakan penyedia lapangan kerja swasta terbesar khusus dua suku Amungme dan Suku Kamoro, dan termasuk salah satu wajib pajak terbesar di Indonesia sejak tahun 2006 ke atas (Mahler dan Sabirin, 2008).

Pada tahun 2006, PTFI berhasil mencapai tingkat produksi tertinggi di saat harga-harga komoditas cukup tinggi. Oleh sebab itu, jumlah pembayaran dalam bentuk pajak, royalti, dividen, dan iuran untuk tahun 2005 mencapai sekitar 1,2 miliar dolar AS, yang merupakan jumlah terbesar sepanjang sejarah PT Freeport McMoran bekerja sama dengan pemerintah Indonesia melalui bidang pertambangan. Sejak tahun 1992, manfaat langsung bagi Indonesia telah mencapai 3,9 miliar dolar AS.

Kontribusi tidak langsung PTFI bagi Indonesia jumlahnya jauh lebih besar lagi, dan sejak tahun 1992 meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Investasi sejumlah hampir 4,8 miliar dolar AS untuk membangun prasarana perusahaan di Papua, termasuk kota-kota, sarana pembangkit listrik, pelabuhan dan bandar udara, jalan, jembatan, terowongan, sarana pembuangan limbah, sistem komunikasi modern, dan prasarana lainnya yang kepemilikannya akan beralih ke Pemerintah Indonesia pada saat masa kontrak berakhir.
2. Investasi sebesar lebih 425 juta dolar AS dalam bentuk prasarana sosial yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat setempat seperti gedung sekolah, rumah sakit, klinik kesehatan, perkantoran, sarana ibadah, sarana rekreasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah lebih khusus dua suku Amungme dan Suku Kamoro.
3. Penyediaan lapangan kerja secara langsung dari PTFI bagi sekitar 8.000 orang pada tahun 2005. Dari jumlah tersebut, lebih dari 2.000 orang, atau lebih dari 25 persen adalah putra daerah Papua secara umum.
4. Pembayaran upah bagi karyawan PTFI sendiri telah mencapai lebih dari 1 miliar dolar AS sejak tahun 1992.
5. Lapangan kerja bagi karyawan kontrak, perusahaan privatisasi dan perusahaan mitra lainnya yang melayani kebutuhan PTFI, jumlahnya mencapai 10.700 pekerja pada tahun 2005. Artinya, jumlah orang yang dipekerjakan atau yang melayani kegiatan operasi secara keseluruhan mencapai sekitar 18.700 orang dengan suku lainnya (PT Freeport Indonesia, 2006).

PT Freeport Indonesia yang adalah sebuah perusahaan pertambangan mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT. Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. Dimana perusahaan tersebut pembayar pajaknya terbesar kepada Indonesia dan merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg setelah melakukan kontrak karya KK II. KK I telah disahkan pada tanggal 7 April 1987 dan KK II pada tanggal 23 Agustus 1989 (Elias P. Japugau, 2002). Masing-masing tambang Erstberg dan Grasberg di kawasan Tembagapura, Kabupaten Mimika Papua berkembang menjadi perusahaan dengan penghasilan 2,3 miliar dolar AS, namun masyarakat tidak merasakan upah darinya, tetap berada dibawah standar kehidupannya yang tidak layak, sosial ekonomi di Papua tetap semakin menurun. Program pembiayaan dari PT Freeport terhadap peningkatan sosial ekonomi

melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAM) dilakukan telah banyak baik pendidikan dan Ekonomi tetapi dilakukan secara tertutup kepada sepihak, masyarakat tertentu. David Dwiarto menuliskan sambutan-sambutan Gubernur Papua Barnabas Suebu tentang daerah wilayah penambangan bahwa kawasan Pegunungan Tengah Papua miskin karena terisolasi.

Jadi jika kita bertanya pada sejarah perjalanan PT.Freeport, jawabannya pahit. Belum tentu, itulah jawabannya. Timika, ibu kota Kabupaten Mimika, adalah salah satu kawasan yang paling terbuka dengan dunia luar. Setiap hari, arus barang dan jasa mengalir lancar ke Timika. Keberadaan PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai pemegang kontrak karya pertambangan emas dan tembaga di Mimika telah menjadi magnet bagi ratusan ribu orang untuk ikut mengambil bahan rezeki di Timika. Hasil dari pembangunan PT Freeport, telah membayar pajak, royalti, deviden, dan iuran kepada Pemerintah Republik Indonesia senilai 3,9 miliar dollar AS. Bahkan, pada 2005 saja nilai pembayaran itu mencapai 1,2 miliar dollar AS. Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menemukan bahwa terjadi efek ganda keberadaan PTFI terhadap Papua dan Indonesia.

Penelitiannya menyimpulkan kontribusi Perusahaan multinasional Amerika mewakili 2,4 persen Produk Domestik Bruto Indonesia, 58 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua, dan 99 persen PDRB Kabupaten Mimika. Kesimpulan berikutnya, PTFI juga menciptakan 37 peluang kerja tidak langsung sehingga secara nasional menambah 277.000 kesempatan kerja. Di sisi lain, efek berganda PT FI itu ternyata tidak membawa perkembangan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Mimika khusus kepada dua suku Amungme dan Suku Kamoro.

Efek berganda PT FI menguntungkan begitu banyak negara, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha di Indonesia. Akan tetapi, masyarakat Mimika belum sepenuhnya memikirkan efek gandanya positif. Oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua JA Djarot Soetanto diukur dari derajat kesehatan dan panjangnya umur, tingkat pendidikan, dan tingkat daya beli masyarakat. Kegiatan pertambangan yang dilakukan, mengancam berbagai kehidupan terutama sosial ekonomi masyarakat disekitar kawasan pertambangan (Kompas, 2008).

Dalam berbagai program pendidikan, telah dicanangkan bersamaan dengan program pemberdayaan ekonomi, baik program jangka panjang maupun jangka pendek. Berdasarkan laporan LPMAM yang bekerja sama Freeport melalui jurnal melaporkan bahwa mulai tahun 2006 telah programkan pembangunan pendidikan, baik sarana maupun prasarana pendidikan demi peningkatan sumber daya kualitas. Peningkatan sumber daya kualitas pendidikan dalam program kemitraannya dua suku yang ada di pedalaman Papua suku Amungme dan Suku Kamoro sebagai hak pemilik ulayat tanah. Program ini telah dicanangka namun dalam kenyataannya hal tersebut diperhatikan secara tidak merata pada semua masyarakat suku Amungme dan suku Kamoro.

Program seperti ini, terjadi perubahan pandangan masyarakat publik, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan PT Freeport khusus LPMAM sangat mewarnai, muncul pemahaman, pandangan negatif dan positif dalam pembangunan sumber daya kualitas pendidikan masyarakat. Dari kalangan tertentu mengatakan sudah berjalan baik dalam pelaksanaan programnya karena sudah ada nyata terutama dalam pembiayaan-pembiayaan khusus beasiswa setiap bulan kepada mahasiswa kedua suku ini. Namun dipihak lain mengobjekkan suku atau kelompok tertentu karena tidak ada pembiayaan yang jelas secara merata. Dengan alasan ini menurut penulis telah terjadi penyimpangan pencanangan program pembiayaan pembangunan pendidikan dari PT Freeport yang bekerja sama dengan LPMAM dari tahun 2006 sampai sekarang.

SEJARAH BERDIRINYA PT FREEPORT

Sejarah pertambangan Freeport di Indonesia, berawal ketika suatu ekspedisi Colijn, yaitu pendakian ke pegunungan tengah Irian Jaya yang ditutupi oleh gletser di tahun 1936. Ahli geologi minyak bumi dari Belanda, Jean-Jacques Dozy menemukan apa yang kemudian dikenal sebagai endapan tembaga terbesar didunia yang berada di atas permukaan tanah. Pada tahun 1960 ketika kepala bagian geologi perusahaan Freeport Sulphur Company, Forbes Wilson dan ahli geologi Delos Flint mengadakan ekspedisi kelokasi setelah membaca sebuah laporan tentang ditemukannya Ertzberg atau Gunung Bijih Timur. Pada tanggal 7 April 1967 ditandatangani Kontrak Karya pertama dengan Pemerintah Indonesia untuk memulai kegiatan eksplorasi di Ertzberg (Mahler dan Sabirin, 2008).

Ertzberg adalah tanah sejarah dari masyarakat Amungme dimulai dari adanya mitos seorang ibu yang kemudian wafat dan berubah menjadi tanah disepanjang daerah Amungme (Tanah Amungme). Oleh karena itu, daerah ini dianggap keramat oleh masyarakat setempat, sehingga secara adat tidak diijinkan untuk dimasuki. Pada tahun 1971, Freeport McMoran Incorporated masuk ke daerah keramat ini untuk membuka tambang Ertzberg mengakibatkan warga suku Amungme dipindahkan ke luar dari wilayah mereka ke wilayah kaki gunung Amungme, namun tambang Ertzberg

ini berakhir masa kerjanya karena kapasitas biji pendulangan atau *open-pit*-nya hanya terbatas sampai tahun 1989. Ijin produksi atau kesepakatan kerja pada tahun 1967, awalnya terjadi sebuah perubahan politik dari Indonesia oleh presiden Soekarno ke presiden Soeharto.

Dengan tegaknya orde baru, maka rezim militer Soeharto membuat sebuah perangkat UU penanaman modal asing tahun 1967 yang berisi modal asing bebas beroperasi di Indonesia. Seminggu UU Nomor 1/1967 tentang Perusahaan Multi Asing (PMA) dinyatakan berlaku. Kontrak karya antara pemerintah Indonesia dan PT, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc Amerika Serikat, ditanda tangani tepatnya pada tanggal 7 April 1967. Pada tahun 1967 kontrak karya pertama dimulai tersebut, daerah Papua secara *defacto* sudah masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI (Yanuaris Douw, 2006).

Penanda tanganan kontrak karya dengan perusahaan multi asing untuk bebas beroperasi wilayah Indonesia tersebut adalah PT. Freeport McMoRan Copper & Gold Inc di Amerika Serikat sekarang. Dimana karakternya adalah lebih pada organisasi ekonomi yang melibatkan diri dalam kegiatan produktif di dua atau lebih negara. Pada umumnya markas besar dari perusahaan multi nasional (PMN) ada pada negara asal dan memperluas usaha keluar negeri dengan membangun atau membeli fasilitas usaha atau membuka cabang di negara lain (Mohtar Mas'ood, 1997).

Perluasan usaha seperti ini disebut penanaman modal asing langsung. PMA langsung, karena kegiatan itu berwujud keterlibatan langsung dalam kegiatan produktif diluar negeri. Hal yang sama dengan PT. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, membangun eksplorasi dan eksploitasi penambangan sejak lama di Indonesia provinsi Papua untuk memberi layanan finansial. Perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua yang mayoritas sahamnya dimiliki PT. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc di Amerika Serikat ini, jika dilihat dari masa kerja dan finansialnya, sudut pandang masyarakat asli khususnya tujuh suku di pedalaman Papua, dan juga berbagai pengalaman pada perusahaan-perusahaan lain di negara-negara, sangat menimbulkan pertentangan dan konflik terhadap negara tuan rumah dalam hal masyarakat setempat sebagai hak pemilik ulayatnya. Masalah seperti PT Freeport di Timika, tidak memperhatikan masyarakat bidang peningkatan sosial ekonomi, walaupun investasi asingnya terlalu banyak, hasil dari penambangannya masuk masuk pasar dunia pasar modal di New York Amerika Serikat.

Dahulu penambangan PT Freeport dimulai oleh perusahaan raksasa dari Amerika sekarang ini tidak melihat masyarakat yang ada di daerah itu, perjanjian yang dibuatpun secara ilegal tanpa diketahui antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat. Malah masyarakatnya dipindahkan ketempat lain karena alasan penambangan sehingga menimbulkan persoalan sosial ekonomi (Giyai dan Kambay, 2003).

Walaupun banyak dana disalurkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAM) di Timika untuk pemberdayaan, tetapi selalu saja terjadi persoalan karena setiap investasi asing yang masuk dari tahun ke tahun belum menjamin kebutuhan masyarakat di Papua karena dipaksakan ketika masyarakat sederhana dalam hal miskin kepada posisi masyarakat maju sama seperti masyarakat di negara maju lain.

Dampak Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

Dampak peningkatan ekonomi terhadap masyarakat terjadi secara langsung dan tidak langsung setelah PT Freeport McMoran Amerika Serikat hadir di Papua wilayah Kabupaten Mimika. Kehadirannya membawahkan perubahan berbagai hal atau dampak positif dan negatifnya, menciptakan dampak yang menguntungkan bagi masyarakat atau merugikan masyarakat daerah penambangan PT Freeport secara khusus dan umumnya masyarakat Papua suku Amungme dan Kamoro. Hal ini dalam media massa maupun elektronik telah banyak diangkat, dari berbagai lembaga Gereja maupun LSM-LSM nasional maupun internasional, lembaga adapt ataupun lembaga-lembaga ilmiah dan non ilmiah seperti sekolah-sekolah tinggi atau kampus-kampus tertua di Indonesia. Ada juga dari beberapa ahli pemerhati masalah dampak dari limbah (Teiling) atau terutama karena diskriminasi terhadap suku-suku yang seharusnya diberdayakan ekonomi rumah tangga atau peningkatan sumber daya kualitas manusia yang berpihak pendidikan secara bertahap dalam membangun masyarakat. Masalah yang diangkat adalah sekelumit dampak positif dan negatif yang sudah menjadi isu permasalahan global, masalah yang telah mendunia nasional maupun internasional ketika dimulainya penambangan.

Masalah yang mempengaruhi aktifitas dan kondisi kehidupan masyarakat setempat, ada juga yang mengangkat tentang kehadiran PT Freeport dalam mengisi pembangunan dan menjawab penderitaan rakyat yang bekerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAM) Timika. Perubahan-perubahan kesejahteraan ekonomi setempat meningkatnya dengan cepat karena arus lalu lintas, karena asimilasi budaya dengan masyarakat luar maupun dalam negeri.

Program yang lebih utama perbaikan kesejahteraan atau peningkatan ekonomi masyarakat setempat, dimana semua dana pemberdayaan disalurkan setiap tahunnya sehingga kehadiran PT Freeport Indonesia telah hadir dengan benar dan nyata di mata publik daerah, nasional dan internasional. Dibawah ini akan dijelaskan hasil penelaahan penulis dari berbagai media yang telah disebutkan di atas dengan dua versi atau sudut pandang dari penulis bidang ekonomi.

1. Sudut Pandang Positif

Laporan dalam jurnal PT FI Pada tahun 2006 menuliskan bahwa dana Kemitraan Freeport bagi Pengembangan Masyarakat sejak tahun 1996 telah menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk memberi manfaat bagi masyarakat setempat melalui dana kemitraan Freeport bagi pengembangan masyarakat. Dana kemitraan tersebut dikelola dan disalurkan melalui suatu organisasi didirikan untuk lembaga yang mandiri dan independen pada tahun 1998. Lembaga organisasi tersebut adalah Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAM). Dan LPMAM ini dikelola oleh badan musyawarah yang terdiri dari perwakilan pemda setempat, tokoh Papua, tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Badan musyawarah LPMAM menetapkan anggaran tahunan bagi tiga bidang program pengembangan utama antara lain: kesehatan, pendidikan dan pengembangan ekonomi selain program lain. Anggaran tersebut disusun berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan. Proyek-proyek yang didukung tersebut memberi manfaat langsung bagi masyarakat Amungme dan Kamoro. Suku kelompok tersebut terwakili dalam dewan LPMAM melalui tokoh-tokoh masyarakat, Gereja, dan pemerintah dari masing-masing kelompok.

LPMAM telah memberikan dampak berarti bagi kehidupan masyarakat setempat melalui pendanaan proyek-proyek yang bermanfaat bagi warga desa di kabupaten Mimika. Beberapa contoh terutama pengembangan ekonomi dan program-program berbasis desa yang menyediakan sarana air bersih, listrik dan prasarana lainnya bagi desa-desa terpencil di daerah pegunungan Papua. LPMAM menjalankan program pengembangan yang cukup berhasil, yang dikelola secara bertanggungjawab dan profesional. Program tersebut merupakan salah satu program pengembangan sosial terbesar yang dinilai pihak swasta di Asia pada umumnya.

Selama tahun 2006, kegiatan utama yang didukung LPMAM dalam pengembangan bidang ekonomi, pengembangan usaha kecil dan menengah PT Freeport Indonesia yang membantu sistem ekonomi lokal yang mampu menunjang pertumbuhan berkelanjutan serta membuka peluang bagi generasi mendatang menurut majalah tahunan PT FI menuliskan dua point penting yaitu: (1). Mendukung dan melakukan pendidikan teknis bagi lebih dari 1300 proyek di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan dan jasa bagi komunitas asli 7 suku di wilayah. (2). Program pengembangan usaha kecil dan menengah PTFI membantu sistem ekonomi lokal yang mampu menunjang pertumbuhan berkelanjutan serta membuka peluang bagi generasi mendatang. Mendukung upaya pengembangan lokal untuk memajukan pertumbuhan ekonomi setempat dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan membuka peluang bagi masyarakat sekitar. pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Seiring dengan pertumbuhan dan perluasan usaha-usaha lokal maka tercipta lebih banyak lagi pekerjaan, lebih banyak upah, lebih banyak pembelanjaan, dan pada akhirnya lebih banyak pendapatan untuk lebih banyak usaha baru, sehingga terbangun sebuah sistem ekonomi yang mampu menunjang pertumbuhan berkelanjutan serta membuka peluang bagi generasi-generasi mendatang.

Data dari hasil survei ekonomi di kabupaten Mimika yang merupakan wilayah kerja PT Freeport Indonesia menunjukan bahwa sekitar 600 dari 726 usaha kecil dan menengah (UKM) yang tercipta memiliki kaitan langsung dengan Freeport Indonesia. UKM-UKM tersebut menjadi landasan bagi sektor usaha yang dinamis dan fleksibel. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi daerah Mimika akan menarik usaha dan produk dari luar yang akan bersaing dengan usaha lokal (http://www/manfaat_ekonomi@yahoo.com).

Guna menghadapi tantangan tersebut, PT Freeport mendukung pengembangan SDM melalui program-program magang, sekolah kejuruan teknik dan bantuan bantuan pendidikan tinggi. Adapun dengan mendorong penerapan teknologi tepat guna, menyediakan pendidikan wiraswasta, dan memudahkan jangkauan modal kerja maka pertumbuhan ekonomi setempat yang berkelanjutan dapat dimajukan sehingga UKM yang ada maupun yang akan datang dapat dipertahankan. Mulai pada tahun 2006, program pengembangan UKM PT Freeport memiliki lebih dari 110 usaha peserta yang menyediakan lebih dari 1600 peluang kerja (Majalah tahunan PT FI, 2007).

Salah satu usaha program utama masyarakat setempat yang dirintis dengan dukungan perusahaan adalah program Wanatani (*Agroforestry*) Amungme yang bekerja menanam, memanggang dan mengemas kopi Arabika yang terkenal di dunia Internasional, serta memasarkannya dibawah merek Amungme Gold. Tahun 2007 program Wanatani Amungme ini telah

menanam 350 pohon kopi baru sebagai tambahan dari sekitar 11.500 pohon yang telah memproduksi biji kopi di 4 desa yang berbeda (www.ptfi.com).

Tujuan utama dari program ini adalah (1). Program rekognisi hak ulayat. Artinya PT Freeport bermitra dengan pimpinan adat kedua suku di daerah penambangan untuk menjadikan masyarakat sejahtera dengan program jangka panjang dan menengah, berawal ketika perjanjian bulan Januari 1974 antara PTFI dan masyarakat Amungme merupakan rekognisi terhadap hak ulayat untuk yang pertama kalinya di Indonesia, yakni hak masyarakat adat atas tanah yang digunakan untuk berburuh dan meramu. Menyusul perjanjian tersebut, pemerintah Indonesia secara resmi mengakui hak kompensasi untuk hak ulayat. Kompensasi yang dinamakan rekognisi tersebut dibayar kepada masyarakat atas pelepasan hak tersebut karena hak ulayat merupakan hak masyarakat bersama. Oleh karena itu PTFI telah membayarnya beberapa kali dalam waktu yang berbeda atas kesepakatan bersama melalui program yang mereka sepakat. Kesepakatan programnya ada dua yaitu; program rekognisi jangka panjang yang tengah berlangsung di daerah dataran tinggi dan dataran rendah pada wilayah kerjanya. Kedua proyek ini menghasilkan proyek pembangunan prasarana dan pengembangan ekonomi bernilai jutaan dollar AS, termasuk perumahan, gedung sekolah dan asrama mahasiswa, klinik pengobatan, sarana ibadah, gedung fasilitas umum, gedung perkantoran, jalan, jembatan, tangki air, tenaga listrik, kapal motor untuk angkutan dan penangkapan ikan, sarana olahraga dan pembuatan study kelayakan terhadap peluang usaha.

Program rekognisi tersebut adalah sebagai berikut: (2). Program rekognisi desa Kamoro, yang merupakan kompensasi atas pelepasan tanah dari lima desa Kamoro di daerah dataran rendah kepada pemerintah Indonesia, termasuk tanah yang digunakan untuk daerah pengendapan sirsat, tempat sarana dermaga pelabuhan laut. (3). Program pembangunan tiga desa, yaitu; program serupa tiga desa Amungme yang terletak di daerah dataran tinggi. Program ini merupakan tambahan atas rekognisi bagi masyarakat Amungme yang tinggal paling dekat dengan lokasi tambang, yang pernah dibayarkan sesuai perjanjian tahun 1974 sejalan dengan perluasan lingkup kegiatan PTFI. Titik berat dari program tersebut program selama tahun 2005 adalah program yang mencakup sarana dan prasarana, termasuk perumahan masyarakat setempat. Disamping itu juga dalam rangka meningkatkan usaha, pihak perusahaan membuka usaha peternakan babi dengan membuat kandang.

Program ini berlanjut terus, telah ditanda tangannya nota kesepahaman antara masyarakat tiga desa tersebut dengan pihak perusahaan, yang memuat garis besar lingkup kerja program rekognisi sampai dengan tahun 2010. Selain itu, pada tahun 2001 telah dibentuk dana perwalian hak ulayat untuk masyarakat suku Amungme dan Kamoro guna memberi rekognisi sukarela bagi pemegang hak ulayat di daerah tambang dan atas perluasan lingkup operasi dan berlanjutnya keberhasilan kegiatan pertambangan. Dalam laporan yang dituliskan LPMK, bahwa PTFI telah menyumbang 8,5 juta dollar AS untuk dana-dana tersebut sampai dengan tahun 2006, sesuai perjanjian hak ulayat yang berlaku, akan tetap memberi sumbangan yang sebesar 1 juta dolar AS setiap tahunnya. Sebagian dari dana tersebut telah digunakan untuk membeli saham Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, yang memungkinkan masyarakat Amungme dan Kamoro untuk menjadi peserta ekuitas pada tambang. Per 31 Desember 2006, dana-dana tersebut menyimpan sejumlah gabungan sebesar hampir 22.000 lembar saham Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., yang nilainya lebih dari 1,2 juta dolar AS berdasarkan harga saham pada tanggal tersebut (Mahler dan Sabirin, 2008).

2. Sudut Pandang Negatif

Data yang penulis peroleh melalui telah pustaka dari berbagai sumber lebih banyak menyoroti, mengobjekkan kinerja kerja yang mempengaruhi dampak dari pembangunan itu sendiri. Memunculkan berbagai pandangan negatif berawal ketika kontrak karya dimulai sejak tahun 1974 sampai sekarang. Ketika pembangunan sedang berlangsung, masyarakatnya sedang mengembara, sedang dalam krisis identitas dan tempat tinggal mereka. Untuk membuktikannya oleh team SKP dalam buku *Memoria Passionis di Papua Tahun 2006* menuliskan dampak-dampak dari penambangan terlalu banyak, pembuangan tailing semakin mengembara ditengah tempat persembunyian masyarakat, dimana tempat masyarakat suku Kamoro mengambil makanan sehari-hari.

Kasus lain yang terjadi, oleh Bahoo Arkelaus dalam tulisan menjelaskan bahwa tanggung jawab Freeport terhadap hak ulayat masyarakat adat pegunungan tengah Papua belum maksimal telah melanggar hak-hak historis realita. Telah terjadi berbagai penyimpangan, diantara satu dari penyimpangan tersebut adalah penyimpangan ekonomi. Sejak bulan April 1967 PT Freeport Indonesia memulai dengan kegiatan eksplorasi di Tembagapura masuk berbagai Investor Asing dari berbagai Negara. Hasil Investigasi salah satu LSM menuliskan bahwa sejak Bulan April tahun 1967 Freeport telah memulai kegiatan eksplorasinya di Papua diperkirakan mengandung cadangan bijih emas terbesar di dunia sebanyak 2,5 milyar ton melalui kontrak karya I yang penuh dengan intrik

dan tipudaya (Renwarin, 2006) Kegiatan eksplorasinya pun tak tanggung-tanggung. Sepanjang tahun 1998, misalnya, PT Freeport Indonesia menghasilkan agregat penjualan 1,71 miliar ton tembaga dan 2,77 juta ton emas (lihat: Sibili Edisi 16/Februari/2006). Tahun 1998, misalnya, PT Freeport memproduksi 5,5 juta ton tembaga, 828 ton perak dan 533 ton emas (lihat: Catatan; Departemen Energi dan Sumber Daya Alam). Dengan penghasilan tersebut Freeport mengantongi keuntungan triliunan rupiah sepanjang tahun. Jadi kita membenarkan Freeport jika hanya dalam kurun waktu dua tahun berhasil memproduksi perolehan bersih US\$ 60 juta dari tembaga yang ditambangnya itu. Itu belum termasuk tambang ikutannya emas, perak, dan yang lainnya. Atau belum ditambah juga penemuan lokasi tambang baru gunung biji Grasberg (Team SKP Jayapura, 2008).

Bila dibandingkan dengan kehidupan masyarakat dahulu dan sekarang di Timika dapat terlihat bahwa sejak PT. Freeport memulai eksplorasinya tahun 1968 daerah Timika kota termasuk Kwamki lama dan baru masih hutan belukar tanpa penghuni. Sebab suku Amungme menghuni wilayah Grasberg sekarang, sedangkan suku Kamoro menghuni wilayah pesisir laut tepatnya wilayah sekitar porsite (pelabuhan Freeport). Ketika Freeport mulai melakukan kegiatan pertambangan, ada beberapa ratus orang hidup di kampung dataran rendah di Timika. Sekarang Timika telah menjadi rumah untuk 100.000 orang lebih, dengan suasana hidup barat karena terjadi asimilasi berbagai budaya lokal maupun nonlokal. Dari keadaan itulah kehidupan masyarakat asli terjadi perubahan kehidupan yang baik menjadi kurang baik. Hasil pertambangannya semakin meningkat, masyarakat dalam kehidupannya sederhana, masyarakat asli Kamoro mereka tersisih dari tempat tinggal mereka sehingga pindah rumah, pindah alamat ditempat pulau-pulau di atas limbah tailing. Dengan demikian otomatis ekonomi masyarakat setempat sangat berpengaruh melemah tidak berkembang dan tidak bias mendapatkan kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Program pemberdayaan berbagai bidang dari LPMK pun mungkin sekali dalam satu tahun atau program jangka panjang yang sangat memakan waktu, terus siapa yang akan memperhatikan ekonomi kehidupan sehari-hari. Dari pengalaman itu kita membuktikan bahwa memang benar sekali Freeport dinilai menjawai paham kapitalisme. Karena sistem dan paham ekonomi yang modalnya bersumber pada pribadi atau modal perusahaan-perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasar bebas. Oleh karena itu keseluruhan hasil perusahaan pertambangan Freeport Indonesia sama sekali tidak menguntungkan masyarakat Papua secara khusus dua suku yang ada dipedalaman Papua tersebut. Keseluruhan hasil hanya masuk di saku para pemodal, pemilik perusahaan dan pihak-pihak berkepentingan.

B. Dampak Peningkatan Sumber Daya Kualitas Pendidikan.

Dalam berbagai program pendidikan juga sudah dicanangkan bersamaan dengan program pemberdayaan ekonomi, baik program jangka panjang maupun jangka pendek. Berdasarkan laporan LPMK, bekerja sama PT Freeport dalam jurnal menuliskan bahwa mulai tahun 2006 telah programkan pembangunan pendidikan, baik sarana maupun prasarana pendidikan demi peningkatan sumber daya kualitas. Peningkatan sumber daya kualitas pendidikan dalam program kemitraannya khusus suku Amungme dan Kamoro yang lebih kualitas pendidikannya tetapi pelaksanaannya dalam program tersebut diperhatikan hanya suku Amungme dan suku Kamoro, karena kegiatan pertambangan dilakukan wilayah daerah mereka. Itu pun hanya sesekali dalam program jangka panjang yang sudah dicanangkan.

Program seperti ini, terjadi perubahan pandangan masyarakat publik, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan PT Freeport sangat mewarnai, muncul pemahaman, pandangan negatif dan positif dalam pembangunan sumber daya kualitas pendidikan masyarakat. Dari kalangan tertentu mengatakan sudah berjalan baik dalam pelaksanaan programnya karena sudah ada nyata terutama dalam pembiayaan-pembiayaan khusus dana pendidikan setiap semesteran kepada mahasiswa dua suku.

1. Sudut Pandang Positif

Dalam majalah tahunan PT Freeport Indonesia menjelaskan bahwa, kerja sama PT Freeport dan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro) dalam pencaangan program pemberdayaan pendidikan jangka panjang, dan menengah telah berjalan. Oleh Agus Kafiari menjelaskan, selain pengembangan ekonomi lokal, menurut August, fokus utama program *community development* PT FI juga menekankan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM dan dukungan dalam pengembangan infrastruktur wilayah. Dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan yakni masyarakat, pemerintah dan pihak swasta. Program tersebut *Comuity Developoment* dialokasikan sebesar 1 % dari keuntungan perusahaan untuk Program Kemitraan. Sedang untuk Program Pengembangan Masyarakat diluar Program Kemitraan, terutama untuk pembangunan infrastruktur, dialokasikan dari dana operasional perusahaan.

John Nakiaya Sekretaris LPMK menjelaskan selama periode tahun 1996 hingga 2006 telah diterima dana dari alokasi 1 % keuntungan PT FI sebesar USD 190.847.906 atau sekitar Rp 1.615,6

miliar. Dana itulah yang selama ini digunakan untuk membiayai program LPMK yang meliputi kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi kerakyatan, kemitraan dengan Lembaga Adat, Kemitraan dengan Lembaga Gereja dan Program Khusus. Dan program pendidikan berupa pembangunan gedung-gedung sekolah maupun pemberian beasiswa. Hal ini bukan di daerah Timika saja tetapi juga daerah lain seperti pembangunan perumahan bagi guru dan fasilitas perpustakaan di Ugimba, Kabupaten Paniai (http://www.Freeport_CD@yahoo.com).

Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro adalah lembaga yang bertanggungjawab mengelola dana masyarakat dalam jumlah jutaan dolar untuk program-program pengembangan di wilayah sekitar proyek Freeport. LPMK tengah menjalankan salah satu program pengembangan terbesar di Indonesia. Pada tahun 2006, pendanaan LPMK yang bersumber dari dana kemitraan Freeport untuk pengembangan masyarakat mencapai sekitar 48 juta dolar AS, dengan jumlah kontribusi seluruh sejak dana tersebut dibentuk 10 tahun yang lalu mencapai sekitar 242 juta dolar AS. LPMK memiliki tanggungjawab terhadap bidang pengembangan ekonomi dan pendidikan wilayah Papua. Pernyataan ini, Jhon Nakiaya, sekretaris pelaksana harian LPMK memahami bahwa menjalankan program kelas dunia memerlukan prospektif global. Itulah salah satu alasan mengapa bagian pengembangan kapasitas dari *Social Outreach and Local Development* PT FI belum lama ini memfasilitasi kunjungan study banding bagi pimpinan LPMK ke Yayasan Palabora di Afrika Selatan telah lama menikmati kemitraan yang panjang dan penuh keberhasilan dengan industri pertambangan. Tujuan utama atau sasaran yang hendak dicapai adalah mempelajari dan membandingkan praktek-praktek terbaik dibidang pengembangan ekonomi dan pendidikan. Dimana ingin menciptakan pengembangan pendidikan kelas atas, kelas dunia dengan negara Afrika Selatan.

Studi banding ini juga merupakan bagian dari dukungan PTFI yang tetap berjalan untuk membantu LPMK memperkuat organisasinya serta meningkatkan dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya keahliannya untuk membantu mitranya di LPMK bekerja menuju pencapaian praktek-praktek terbaik, termasuk memfasilitasi pengenalan terhadap program-program berhasil lainnya. Selain itu, beberapa pendanaan program pendidikan dalam rangka meningkatkan sumber daya kualitas, beberapa ribu pelajar dan mahasiswa asal kabupaten Mimika dari berbagai suku telah dibiayai mulai tahun 2006 sampai sekarang melalui program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan masyarakat. Data yang penulis didapat melalui telah pustaka tentang pendanaan pembangunan dalam rangka peningkatan SDM adalah sebagai berikut:

1) Beasiswa untuk lebih dari 1500 pelajar sekolah tingkat menengah hingga perguruan tinggi dengan lebih 300 pelajar tingkat S-2 yang sudah lulus.

2) Peningkatan kualitas asrama pelajar melalui pembangunan asrama-asrama baru bagi pelajar putra dan putri serta membiayai empat asrama lainnya, sehingga para pelajar dari daerah terpencil mempunyai kesempatan untuk sekolah.

3) Melakukan kemitraan dengan yayasan pendidikan gereja, pembangunan fasilitas sekolah dan kelas baru serta merekrut guru-guru tambahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah pesisir.

4) Mendukung dan melakukan pendidikan teknis bagi lebih dari 1300 proyek dibidang pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan dan jasa bagi komunitas asli tujuh suku di wilayah tersebut.

2. Sudut Pandang Negatif

Ada hal yang sangat kita bangga adalah perhatian terhadap peningkatan masyarakat Papua dalam berbagai bidang terutama sumber daya kualitasnya yang telah berjalan dengan baik tanpa merugikan pihak manapun, banyak orang telah ditamatkan baik dari sekolah TK sampai berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Namun dari sudut pandang negatifnya selalu mengalami banyak kekurangan, banyak melanggar hak mendapatkan pendidikan atas anak bangsa. Telah merugikan masyarakat berarti telah terjadi bertentangan dengan program dan misi pembangunan provinsi Papua khususnya kabupaten Mimika pada dua suku Amungme dan Kamoro. Hal ini kami boleh membuktikan dengan dukungan-dukungan beasiswa untuk meningkatkan sumber daya kualitas masyarakat oleh PT Freeport Indonesia dengan pemerintah setempat. Dalam program visi dan misinya telah dimuat berbagai program, namun terealisasinya tidak sampai pada dua suku Amungme dan Kamoro.

Dalam buku Dr. Benny Giay dan Yafet Kambai dengan judul *YOSEPA ALOMANG; Pergulatan Seorang Perempuan Papua Melawan Penindasan*, menuliskan cerita seorang perempuan Amungme dengan kehidupannya dahulu setelah masuknya PT Freeport; masyarakat setempat dipindahkan dengan tindakan tegas dan sangat mendiskriminasi suku kelompok minoritas di Amungme daerah penambangan, karena wilayah mereka telah menjadikan barometer bisnis sehingga perusahaan asing masuk di daerah itu. Tindakannya berbagai macam cara, memindahkan

masyarakat dengan paksa ke Agimuga karena adanya program pertanian, anak-anak sekolah tidak melanjutkan lagi karena berbagai alasan (Beny dan Kambay, 2006).

Berdasarkan hasil ekspedisi Papua oleh Kompas pada tahun 2008, menuliskan beberapa guru zaman Belanda yang masih ada ketika penulis menelahnya bahwa pendidikan yang berjalan sangat mundur, kemunduran terjadi ketika mereka membandingkannya dengan zaman Belanda lebih dari 50 tahun silam. Ketika PT Freeport memulai eksplorasi dan eksploitasi hasil kekayaan tidak memihak hak pendidikan secara baik kepada anak-anak Papua khusus dua suku diatas. Pemerintah Provinsi dan kabupaten pun masih menjadi persoalan generasi bangsa, generasi penerus sekarang. Contoh lain, oleh Ibu Guru Theresia Esi Samkakai; guru yang mengajar sampai sekarang hamper sebagian wilayah pedalaman Papua pun menjelaskan hasil surveinya bahwa kondisi anak-anaknya tidak beranjak dari masa lalunya; dekil, penyakit kulit, serta buta huruf dan angka, mutu pendidikannya lebih buruk lagi. Dipedalaman banyak sekolah tidak beroperasi. Fasilitas sekolah tidak memadai baik dari gedungnya dan peralatannya apalagi tenaga-tenaga gurunya. Tidak mampu untuk mengajarnya karena tidak datang disekolah karena jauh tempat sekolah, tidak ada biaya sekolah, dan lain-lainnya (Kompas, 2008).

Hasil survei sosial ekonomi (susenas) 2006 yang dilakukan badan pusat statistik (BPS) Papua menunjukan, sebanyak 73.729 Orang dari 432.122 anak di Papua berusia 7-15 tahun tidak pernah sekolah (kompas; ekspedisi tanah papua, 2008). Secara khusus Suku Amungme dan Kamoro juga adalah daerah Operasi PT Freeport adalah daerah yang semakin pesat perkembangannya tetapi Kuantitas pelajar dan mahasiswanya semakin banyak, peningkatannya terhadap kualitas dalam dukungan-dukungannya sangat minim. Faktanya banyak anak-anak yang tinggal di hutan belantara tanpa hubungan kontak dengan dunia luar. Dana kemitraan PT Freeport melalui LPMK dan Pemda kabupaten maupun provinsi disalurkan bermiliaran, namun tidak terealisasi dengan baik, apalagi otonomi khusus yang katanya pendidikan anak negeri harus menyatu. Pembangunan pendidikan dan ekonomi seharusnya dilakukan desentralisasi dari sentral.

KESIMPULAN

Dalam bagian ini penulis menarik beberapa kesimpulan terhadap masalah yang dianalisis pada bab sebelumnya. Maka secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan PT Freeport di wilayah pedalaman Kabupaten Mimika bidang pertambangan adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi social bidang ekonomi dan pendidikan lokal suku Amungme dan Kamoro secara global untuk menjawab tuntutan realitas masalah pada masyarakat umum di Indonesia dan khususnya dua Suku Amungme dan Kamoro sebagai pemilik hak ulayat daerah penambangan PT Freeport. Mendukung tujuan dan program ini, pada tahun 1996 sampai pada tahun 2006 telah dianggarkan keuntungan dari hasil 1% sebesar USD 190.847.906 atau sekitar Rp 1.615,6 miliar untuk digunakan dalam berbagai program terutama sosial ekonomi diantaranya pendidikan baik sumber daya manusia maupun infrastruktur dan ekonomi rakyat secara bertahap dalam berbagai bidang melalui *Community Development*.
2. Dalam berbagai dana dialokasikan untuk memperdayakan baik pendidikan maupun ekonomi namun, berbagai stake holder terutama masyarakat, mahasiswa dan para pemerhati atau pengamat masalah pertambangan mengatakan bahwa hasil investasi asingnya dari pembangunan PT Freeport telah banyak tetapi masyarakatnya belum merasakan secara baik, hanya yang terjadi adalah penambangan untuk membuka tanah adat demi pembangunan negara dan bangsa dan proses pelaksanaan dalam pembangunannya terutama pemanfaatan hasil terhadap masyarakat tidak sederhana.
3. Akibat dari beberapa konsep dan pandangan di atas menimbulkan konflik kepentingan horizontal maupun vertikal yang mengarah pada perbedaan konflik suku, ras, agama, dan etnis.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Antoh, Demianus (2008), *Menggugat Implementasi Otsus Papua*, Cetakan I, Pusat Pengkajian Pembangunan Papua (P4), Sorong

Chan Sam M, dan Tuti T. Sam (2001), *Investasi: Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, Raja Wali Persada, Jakarta

- Giyai, Benny, dan Yafet, Kambay (2003), *Pergulatan Seorang Perempuan Papua Melawan Penindasan*, Kerja Sama European Commission dan Elsham Papua, Jayapura
- Hasbullah (2006), *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Holsty, KJ (1988), *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, Erlangga, Jakarta
- Kansil, C.S.T, dan Kristina S.T.Kansil (2005), *Hukum Perusahaan Indonesia: Aspek Hukum dalam Ekonomi 1*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Mahler, Armando, dan Nurhadi Sabirin (2008), *Dari Grasber Sampai Amamapare Proses Penambangan Tembaga dan Emas Mulai Hulu Hingga Hilir*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta
- Mas'ood, Mochtar (1997), *Perusahaan Multi Nasional dalam Ekonomi Politik Internasional*, Bahan Kuliah Fisipol UGM, Yogyakarta
- Muller, Kai (1997), *Mengenal Papua*, PT. Freeport Indonesia, Papua
- Soehoed, AR (2005), *Sejarah Pengembangan Pertambangan PT. Freeport Indonesia di Propinsi Papua Jilid 2*, Aksara Karunia, Jakarta
- Team SKP Jayapura (2008), *Memoria Pasionis di Papua Tahun 2006*, SKP Keuskupan Jayapura, Papua
- T. May, Rudy (2003), *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global : Isu, Konsep, Teori, dan Paradigma*, Refika Aditama, Bandung
- Wardaya.T, Baskara (2008), *Indonesia Melawan Amerika: Konflik Perang Dingin 1953-1963*, Galangpress, Yogyakarta
- Yanuar, Ikbar (2006), *Ekonomi Politik Internasional: Teori dan Konsep Jilid 1*, Refika Aditama, Bandung

B. JURNAL

- PT. Freeport Indonesia (2007), *Nilai Mendasar Freeport Indonesia Laporan Berkarya Menuju Pembangunan Berkelanjutan 2006*, PT. Freeport Indonesia, Timika
- _____(2006), *Grasberg 2006 Tour Companion*, PT. Freeport Indonesia, Timika
- _____(2001), *Kesepakatan Kerja Bersama XI 1999-2001*, PT. Freeport Indonesia, Timika
- BPIDP (2003), *Peluang Investasi di Papua*, BPIDP, Jayapura